

*OGI Goes to Campus*

# Penjaringan Masukan Publik: Isu Strategis Keterbukaan Pemerintah

Prahesti Pandanwangi  
Direktur Aparatur Negara  
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas

Cambridge Hotel, Medan, 29 Maret 2022

# Daftar Isi

**GAMBARAN UMUM OGI**

**1**

**DINAMIKA STRATEGIS**

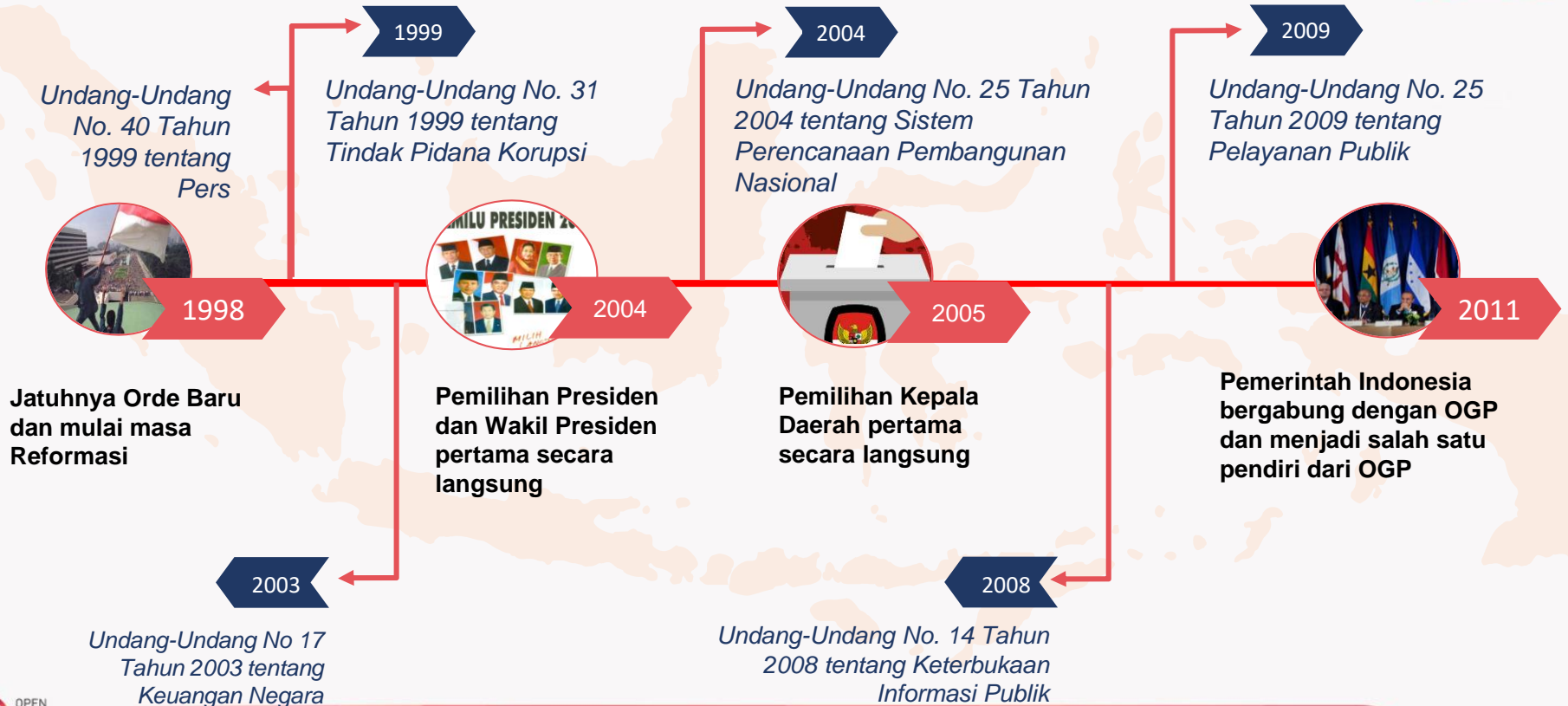
**2**

**PENJARINGAN MASUKAN RENCANA AKSI NASIONAL  
OGI 2022-2024**

**3**

# GAMBARAN UMUM OGI

# Perjalanan Keterbukaan Pemerintah di Indonesia



# Sekilas tentang Open Government Indonesia (OGI)



Di 2011, Indonesia dan 7 negara lainnya mendirikan *Open Government Partnership* (OGP) untuk mendorong pemerintahan yang inklusif, responsif, dan akuntabel.

Sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam OGP, Pemerintah Indonesia membentuk OGI. Partisipasi Indonesia di OGP diatur dalam Kepmen 13 Tahun 2014.

## Mitra Masyarakat Sipil

PATIRO

PLAN

YLBHI

INDONESIAN PARLIAMENTARY CENTER

SIIR

YAPPIRA

AMRI

SEKNAS FITRA

## Mitra Pemerintah



OGI adalah gerakan **kolaborasi** antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk **mendorong praktik keterbukaan pemerintah**.



**Sekretariat Nasional OGI (Setnas OGI)** dibentuk pada tahun 2011.

# Perjalanan Open Government Indonesia





# Nilai-Nilai OGI



## Akuntabilitas

Mendorong Implementasi  
Program Pemerintah yang  
**Dapat  
Dipertanggungjawabkan**



## Transparansi

Membangun  
**Transparansi** Kinerja  
Pemerintahan



## Inovasi

**Penyempurnaan** dan  
**Peningkatan Kualitas**  
Reformasi Birokrasi  
Nasional (RBN)



## Partisipasi

Meningkatkan  
**Partisipasi Publik**  
dalam Proses  
Pengambilan Kebijakan  
Publik



## Inklusif

**Merangkul  
Kelompok  
Terpinggirkan** dalam  
Perencanaan  
Pembangunan

# Komitmen Keterbukaan Pemerintah (RAN OGI I – VI)

## *Pelayanan Publik (54 Komitmen)*

- Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR!
- Perluasan akses dan kapasitas layanan Bantuan Hukum
- Peningkatan transparansi dan kualitas Pelayanan Publik
- Pengembangan Sistem Kesehatan dan Reproduksi Berbasis Data

## *Tata Kelola Digital (31 Komitmen)*

- Pengembangan Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Tingkat Pemerintah Daerah
- Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik
- Keterbukaan data pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemilu
- Pengembangan *Smart City* dan *Open Government*

## *Anti-Korupsi (25 Komitmen)*

- Partisipasi Publik dalam Perencanaan, Program dan Anggaran
- Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Transparansi Sektor Publik

## *Pemberdayaan Masyarakat (15 Komitmen)*

- Diseminasi Pengembangan Informasi
- Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
- Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal

## *Civic Space (6 Komitmen)*

- Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR
- Pelibatan dalam penyusunan Perda via E-Legislati
- Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan



# Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2020-2022



**106**  
*Rapat*



**53%**  
*Peserta Diskusi adalah Perempuan*

**18**

Komitmen

**35**

Ukuran Keberhasilan

**21**

Kementerian/  
Lembaga

**24**

Organisasi Masyarakat Sipil

1. Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Peningkatan Kualitas Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR!
3. Pengembangan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah
4. Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
5. Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal
6. Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Tahapan Peradilan
7. Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum
8. Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum
9. Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum
10. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi
11. Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
12. Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa
13. Keterbukaan Data Pemilu
14. Pengembangan Sistem Digital Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi
15. Keterbukaan Informasi Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19
16. Pelibatan Masyarakat Sipil dalam Pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)
17. Keterbukaan Data *Beneficial Ownership*
18. Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

# Kunci Utama Kolaborasi Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Renaksi OGI



Mendorong **komitmen yang berkelanjutan** bagi pemangku kepentingan *open government*



Meningkatkan **kerjasama dan berbagi pengetahuan** dengan pemangku kepentingan lainnya.

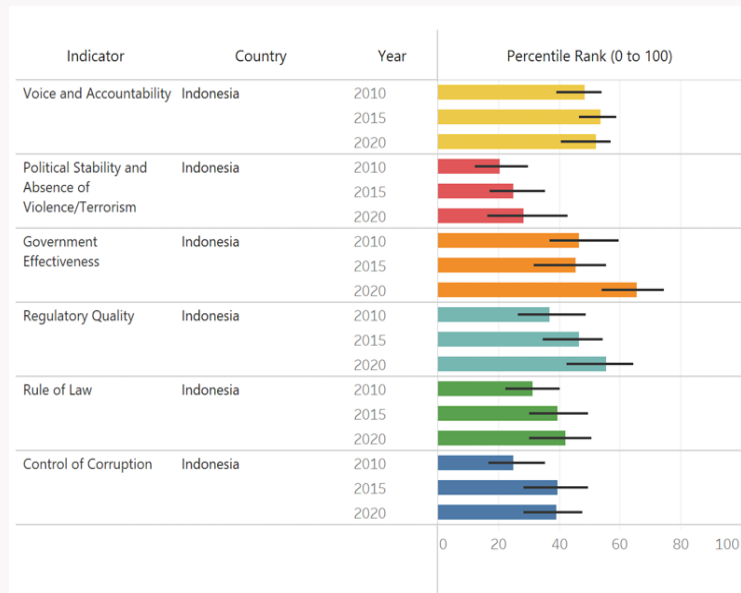


Memastikan **partisipasi dan pelibatan masyarakat yang inklusif** dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.

# DINAMIKA STRATEGIS

# Keterbukaan Pemerintah dalam World Governance Index

## World Governance Index (WGI) 2020



Sumber: World Governance Indicators 2021, World Bank.

### Voice and Accountability

Penurunan kebebasan berekspresi tergambarkan juga dalam kondisi **Civic Space** Indonesia yang mendapatkan predikat **Obstructed** dari CIVICUS

### Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

*The Economist Intelligence Unit* menilai **Partisipasi Politik** dalam demokrasi di Indonesia meningkat 1.11 poin dari tahun 2020 dengan nilai **7.22** pada tahun 2021

### Government Effectiveness

*The Global Economy* menunjukkan adanya **peningkatan signifikan (+0.19 Poin)** untuk **Government Effectiveness** pada tahun 2020. Selain itu, nilai E-Government Development Index menunjukkan Indonesia selalu mengalami **peningkatan dalam 5 Tahun terakhir**

### Regulatory Quality

Perbaikan tumpang tindih kebijakan semakin baik. Data *The Global Economy* terkait **Regulatory Quality** menunjukkan adanya perbaikan nilai **signifikan** dari **-0.09 (2019) menjadi 0.08 (2020)**.

### Rule of Law

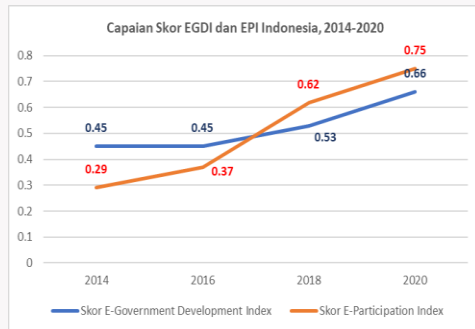
Pembenahan pada indikator penegakan hukum **semakin membaik**. Hal tersebut sejalan dengan nilai Indeks Pembangunan Hukum Indonesia (IPH) 2020 yang berada pada nilai 0.65 atau **meningkat 0.17 poin sejak tahun 2015**. Namun, pada tahun 2021 nilai IPH menurun menjadi 0.54

### Control of Corruption

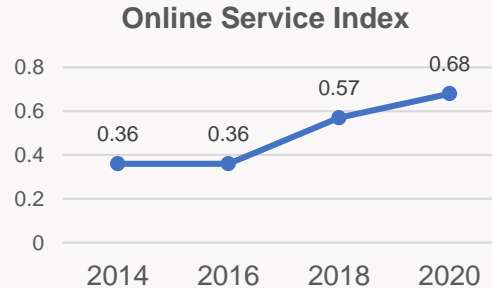
Pada Tahun 2020, kondisi kontrol terhadap Korupsi mengalami penurunan. Hal tersebut tergambarkan dalam **Corruption Perception Index 2020** yang **menurun 2 poin**

# Capaian Keterbukaan Pemerintah Melalui Transformasi Digital

Mendorong Keterbukaan Pemerintah melalui **Transformasi Digital**



Sumber: UN Department of Social and Economic Affairs, 2016-2020, diolah



Upaya keterbukaan pemerintah melalui pemanfaatan masif transformasi digital dibuktikan lewat tren **peningkatan skor E-Government Development Index (EGDI)**, **E-Participation Index (EPI)**, dan **Online Service Index** yang disusun PBB. Hal tersebut mendorong hadirnya inovasi, partisipasi, akuntabilitas,



Wujud nyata dari peningkatan Indeks-indeks tersebut adalah hadirnya **Pelayanan Publik Berbasis Digital** yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi Masyarakat yang lebih luas

# Dinamika Strategis Keterbukaan Pemerintah



Nilai Indeks  
Keterbukaan  
Informasi Publik  
Indonesia 2021

72.6/  
100

## Peringkat Dimensi Keterbukaan



Hukum  
74,53



Sosial Politik  
72,11



Ekonomi  
70,51

## Indikator Keterbukaan Informasi terbaik



Jaminan Hukum terhadap  
Akses atas Informasi Publik



Kebebasan  
menyebarkan  
informasi



Perlindungan Bagi  
Pemohon Informasi Publik

## Indikator Keterbukaan Informasi terendah



Dukungan Anggaran  
Pengelolaan Informasi Publik



Transparansi



Literasi Publik atas Hak  
Keterbukaan Informasi

## Peringkat IKIP Berdasarkan Provinsi



1

Bali  
89,94



2

Kalimantan  
Barat  
85,4



23

Sumatera  
Utara  
69,2



34

Papua Barat  
38,5

## Nilai Berdasarkan Dimensi



Hukum  
75

Regulasi terkait akses informasi publik telah terakomodir dengan baik di Provinsi Sumatera Utara. Namun **inisiatif APH untuk menindaklanjuti kelompok yang menghalangi kebebasan informasi masih rendah**



Ekonomi  
66

**Transparansi** dalam **perencanaan dan anggaran** perlu ditingkatkan Pemerintah Sumatera Utara

## Nilai Berdasarkan Indikator

Terendah



Transparansi  
58 (Buruk)



Kebebasan dari  
penyalahgunaan  
Informasi  
61 (Sedang)



Jaminan Hukum terhadap  
Akses atas Informasi  
Publik  
76 (Sedang)



Keberagaman  
Kepemilikan  
Media  
75 (Sedang)

Tertinggi

## Nilai Indeks Lainnya terkait Keterbukaan Pemerintah di Sumatera Utara



Indeks  
Demokrasi  
Indonesia  
65.13



Indeks  
Kebebasan Pers  
75.1



Indeks Pembangunan  
Manusia  
72



# **PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL OGI 2022-2024**

# Penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia



RAN OGI 2020-2022  
Akan berakhir pada  
Desember 2022

Penyusunan Rencana Aksi  
Nasional Open  
Government Indonesia  
2022-2024

- Rencana Aksi Nasional OGI 2020-2022 akan **berakhir** pada **Desember 2022**. Pada tahun 2022, Sekretariat OGI akan melaksanakan **Perumusan RAN OGI VII 2022-2024**.
- RAN VII OGI paling lambat dikumpulkan pada: **Februari 2023**

## Timeline Perumusan RAN OGI VII 2022-2024



Perumusan RAN OGI 2022-2024 dibagi ke dalam lima tahap:

1. **Pemetaan Isu Strategis:** Penetapan dari **Dewan Pengarah** terkait sektor atau isu Keterbukaan yang menjadi prioritas dalam RAN OGI VII 2022-2024
2. **Uji Publik Isu Strategis:** Ruang bagi masyarakat/unsur non-pemerintah untuk memberikan kritik/saran terkait isu strategis yang dipilih
3. **Kick-Off Penyusunan RAN 2022-2024:** Kementerian/Lembaga dan Unsur Non-Pemerintah memberikan proposal untuk dimasukkan dalam RAN OGI VII 2022-2024
4. **Rapat Koordinasi dengan K/L dan OMS:** Komitmen terpilih didiskusikan dan ditetapkan dengan stakeholders terkait (K/L, Bappenas, SDGs, dan OMS).
5. **Penyusunan Dokumen RAN:** Drafting dokumen RAN OGI VII untuk dikirimkan kepada OGP SU



Gedung MR21, lantai 11  
Jalan Menteng Raya 21 DKI Jakarta 10340

<http://ogi.bappenas.go.id>  
[sekretariat.ogi@bappenas.go.id](mailto:sekretariat.ogi@bappenas.go.id)



# SELAMAT BERDISKUSI!



sekretariat.ogi@bappenas.go.id |    @opengovindo |  indonesiaopengov



@opengovindo



indonesiaopengov